

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU **TAHUN 2025**

RENCANA KERJA **(RENJA)**

DINAS SOSIAL

Jl. Pahlawan No.....(Ex Kompleks Perkantoran Pemkab. Luwu)
Email : dinsos2018@gmail.com Kode Pos 91994

BELOPA

PENGANTAR

Puji syukur Kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, atas Petunjuk dan HidayahNya sehingga Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Luwu dapat diselesaikan. Penyusunan Renja Perubahan ini dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelaraskan arah kebijakan maupun pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Luwu dan RPJMD Kabupaten Luwu tahun 2024-2026.

Dalam rangka mewujudkan good governance, maka Dinas Sosial sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara konsisten dan optimal akan melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur sesuai dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 151 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Sosial Kabupaten Luwu Dinas Sosial Kabupaten.

Salah satu tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 ini adalah untuk meningkatkan mutu layanan di bidang sosial dan memberikan informasi sekaligus sebagai bahan evaluasi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Luwu pada tahun 2025.

Kami menyadari bahwa penyusunan ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan untuk kesempurnaannya. Ucapan terima kasih disampaikan kepadasemua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian Renja ini, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua pihak dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Belopa,

2025

KEPALA DINAS SOSIAL

Hi. HASLIANA NURDIN, S.Pt., M.M

Pkt. Pembina Utama Muda

NIP. 196905121995032004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang.....	1
1.1 Landasan Hukum.....	4
1.2 Maksud dan Tujuan	6
1.3 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	30
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	32
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	45
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	46
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	46
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	48
3.3 Program dan Kegiatan.....	56
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	59
BAB V PENUTUP	75

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Tahun 2025.....	20
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Layanan Dinas Sosial Kab. Luwu	26
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025.....	33
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2025	45
Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	49
Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Unit Kerja Penanggung Jawab serta lokasi	50
Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Renja Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026	60



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang pedoman pelaksanaannya diatur pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

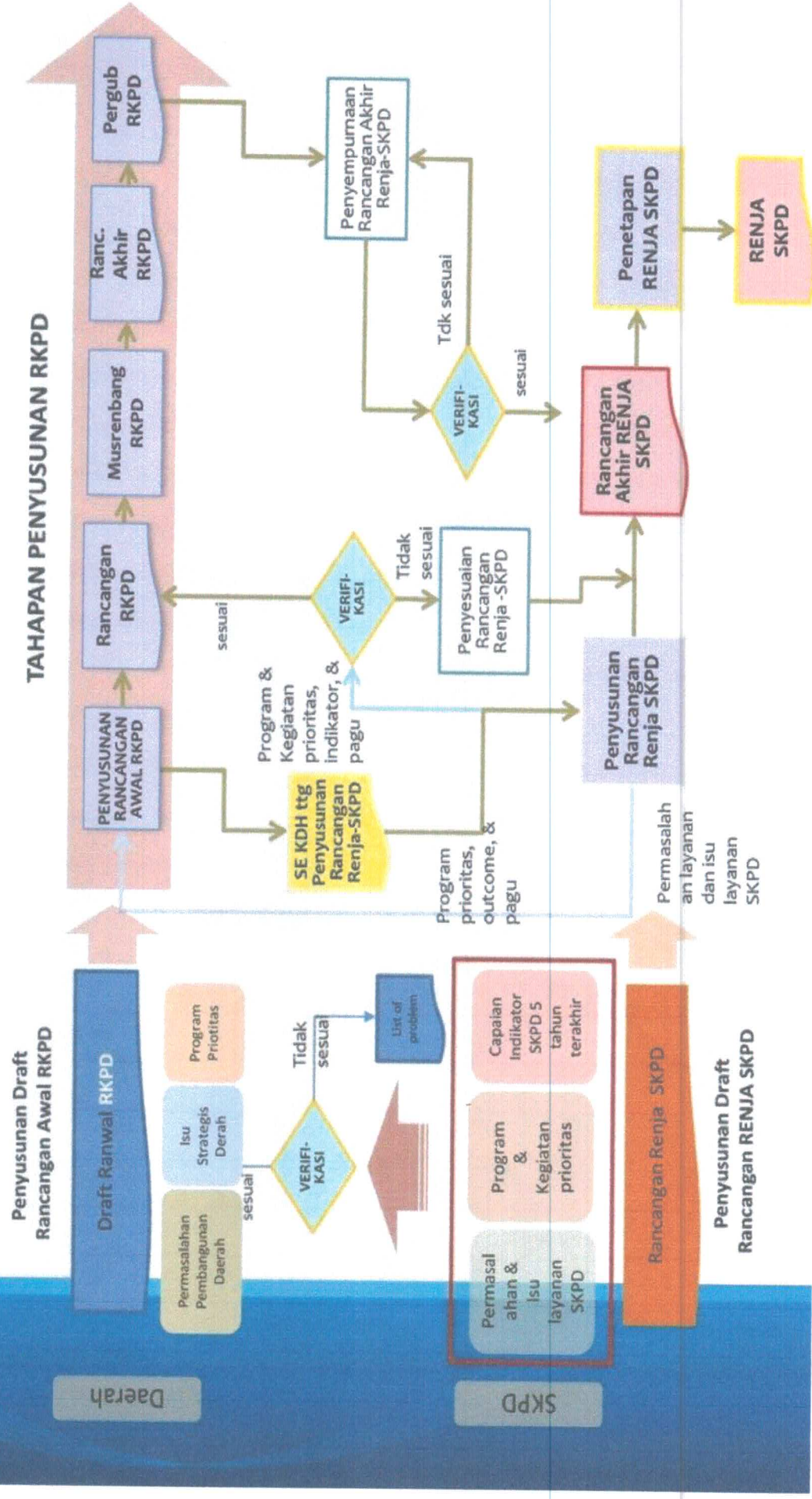
Proses penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2025 didasarkan kepada Renstra Perubahan Dinas Sosial Tahun 2024-2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang dituangkan di dalam dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, agar dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Luwu Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 151 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Sosial Kabupaten Luwu. Dinas Sosial merupakan unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial berdasarkan asas desentralisasi, dekontralisasi dan tugas pembantuan. Dinas Sosial sebagai penyelenggara kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial tentunya wajib menyusun program dan kegiatan yang dapat mendukung ketercapaian target kebijakan Pemerintah Kabupaten Luwu

hususnya yang terkait dengan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum dalam Renja Kerja 2025 sebagai upaya mendukung terwujudnya visi Kabupaten Luwu yaitu “**Kabupaten Luwu yang Maju, Sejahtera dan Mandiri, dalam Nuansa Religi**”.



KETERKAITAN TAHAP PENYUSUNAN RKPD & RENJA SKPD



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja perangkat daerah antara lain adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 244)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) lembaran negara republic Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 9 Lembaga Negara Tahun 2022 Nomor 4, perubahan lembaran Negara Nomor 6757);
5. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 17. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;
 18. Peraturan Bupati Luwu Nomor 151 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Sosial Kabupaten Luwu.
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024;
 20. Peraturan Bupati Luwu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Tahun 2022;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Daerah atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2022 tentang RPJMD Kabupaten Luwu tahun 2019-2024;
 22. Peraturan Bupati Luwu Nomor 80 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 67 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh OPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Pelaksanaan RENJA Dinas Sosial pada setiap tahun anggaran dilakukan evaluasi antara anggaran dengan realisasi dengan memperhatikan unsure ekonomis, efektif, dan efisien. Untuk Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Luwu pada TA. 2023 adalah sebesar Rp. 4.862.495.295 (Empat Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), dan Realisasi sebesar Rp. 4.781.858.884 (Empat Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Luwu sampai dengan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS SOSIAL S/D TAHUN 2023
PROPINSI SULAWESI SELATAN KABUPATEN LUWU

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)		JUMLAH DANA / DPA	BOBOT	REALISASI KEUANGAN (RP)	REALISASI (%)		TERTIMBANG %		PPTK/PELAKSANA
		TOLAK UKUR	SATUAN (UNIT)				KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN (%)	FISIK (%)	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.792.972.005	78,00	3.738.882.164	98,57	97,83	76,89	76,31	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			33.146.960	0,68	32.827.850	99,04	96,48	0,68	0,66	
1.06.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	16.411.060	0,34	16.375.990	99,79	99,79	0,34	0,34	ASRIANTI, S.Tr.Keb., MM
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			16.411.060	0,34	16.375.990	99,79	99,79			
1.06.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	999.860	0,02	999.860	100	100	0,02	0,02	ASRIANTI, S.Tr.Keb., MM
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			999.860	0,02	999.860	100	100			
1.06.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	999.780	0,02	999.780	100	100	0,02	0,02	ASRIANTI, S.Tr.Keb., MM
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			999.780	0,02	999.780	100	100			
1.06.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.249.840	0,03	991.400	79,32	79,32	0,02	0,02	ASRIANTI, S.Tr.Keb., MM
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			1.249.840	0,03	991.400	79,32	79,32			

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)		Jumlah Dana / DPA	BOBOT	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI (%)		TERTIMBANG %		PPTK/PELAKSANA
		TOLAK UKUR	SATUAN (UNIT)				KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN (%)	FISIK (%)	
1.06.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	999.740	0,02	999.740	100	100	0,02	0,02	ASRIANTI, S.Tr.Keb., MM
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			999.740	0,02	999.740	100	100			
1.06.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	12.486.680	0,26	12.461.080	99,79	99,79	0,26	0,26	ASRIANTI, S.Tr.Keb., MM
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi - Swakelola			12.486.680	0,26	12.461.080	99,79	99,79			
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.071.453.403	63,17	3.029.453.666	98,63	99,59	62,30	62,91	
1.06.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	2.970.080.973	61,08	2.928.281.366	98,59	98,59	60,22	60,22	ASRIANTI, S.Tr.Keb., MM
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			2.970.080.973	61,08	2.928.281.366	98,59	98,59			
1.06.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	96.480.000	1,98	96.280.000	99,79	99,79	1,98	1,98	ASRIANTI, S.Tr.Keb., MM
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			96.480.000	1,98	96.280.000	99,79	99,79			
1.06.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	1.184.990	0,02	1.184.860	99,99	99,99	0,02	0,02	ASRIANTI, S.Tr.Keb., MM
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			1.184.990	0,02	1.184.860	99,99	99,99			

1.06.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	14 Laporan	3.707.440	0,08	3.707.440	100	3.707.440	100	0,08	0,08	ASRIANTI, S.Tr.Keb., MM
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			3.707.440	0,08	3.707.440	100	3.707.440	100			
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			6.467.610	0,13	5.467.480	84,54	5.467.480	84,54	0,11	0,11	
1.06.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.467.610	0,13	5.467.480	84,54	5.467.480	84,54	0,11	0,11	ASRIANTI, S.Tr.Keb., MM
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			6.467.610	0,13	5.467.480	84,54	5.467.480	84,54			
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			349.135.155	7,18	349.006.560	99,96	349.006.560	99,91	7,18	7,17	
1.06.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	3.794.700	0,08	3.794.700	100	3.794.700	100	0,08	0,08	ASRIANTI, S.Tr.Keb., MM
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			3.794.700	0,08	3.794.700	100	3.794.700	100			
1.06.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Pertengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Pertengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	42.500.000	0,87	42.500.000	100	42.500.000	100	0,87	0,87	ASRIANTI, S.Tr.Keb., MM
	Dana Bagi Hasil - Belanja Modal - Swakelola			42.500.000	0,87	42.500.000	100	42.500.000	100			
1.06.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	10.112.825	0,21	10.110.230	99,97	10.110.230	99,97	0,21	0,21	ASRIANTI, S.Tr.Keb., MM
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			10.112.825	0,21	10.110.230	99,97	10.110.230	99,97			
1.06.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	2.623.740	0,05	2.623.690	100	2.623.690	100	0,05	0,05	ASRIANTI, S.Tr.Keb., MM
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			2.623.740	0,05	2.623.690	100	2.623.690	100			

1.06.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	14.400.000	0,3	14.300.000	99,31	99,31	0,29	0,29	ASRIANTI, S.Tr.Keb., MM
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			14.400.000	0,3	14.300.000	99,31	99,31			
1.06.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	21.131.890	0,43	21.128.640	99,98	99,98	0,43	0,43	ASRIANTI, S.Tr.Keb., MM
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			21.131.890	0,43	21.128.640	99,98	99,98			
1.06.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	810.000	0,02	810.000	100	100	0,02	0,02	ASRIANTI, S.Tr.Keb., MM
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			810.000	0,02	810.000	100	100			
1.06.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 Laporan	253.762.000	5,22	253.739.300	99,99	99,99	5,22	5,22	ASRIANTI, S.Tr.Keb., MM
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			253.762.000	5,22	253.739.300	99,99	99,99			
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			261.807.133	5,38	255.675.158	97,66	97,48	5,26	5,25	
1.06.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1400 Laporan	8.802.600	0,18	8.802.200	100	100	0,18	0,18	ASRIANTI, S.Tr.Keb., MM
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			8.802.600	0,18	8.802.200	100	100			
1.06.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	81.004.533	1,67	74.872.958	92,43	92,43	1,54	1,54	ASRIANTI, S.Tr.Keb., MM
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			81.004.533	1,67	74.872.958	92,43	92,43			
1.06.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 Laporan	172.000.000	3,54	172.000.000	100	100	3,54	3,54	ASRIANTI, S.Tr.Keb., MM
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			172.000.000	3,54	172.000.000	100	100			

1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		70.961.744	1,46	66.451.450	93,64	97,42	1,37	1,42	
1.06.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	59.790.600	1,23	55.291.200	92,47	1,14	1,14	ASRIANTI, S.Tr.Keb., MM
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola				59.790.600	1,23	92,47			
1.06.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	4.436.000	0,09	4.430.000	99,86	0,09	0,09	ASRIANTI, S.Tr.Keb., MM
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola				4.436.000	0,09	99,86			
1.06.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	6.735.144	0,14	6.730.250	99,93	0,14	0,14	ASRIANTI, S.Tr.Keb., MM
	Pendapatan Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola				6.735.144	0,14	99,93			
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				41.632.100	0,86	99,62	0,85	0,85	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				41.632.100	0,86	99,58	0,85	0,85	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	19 Orang	28.317.000	0,58	28.235.800	99,71	0,58	0,58	HELMI HALIM, SE
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola				28.317.000	0,58	99,71			
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Sertifikat	13.315.100	0,27	13.240.100	99,44	0,27	0,27	HELMI HALIM, SE

	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			13.315.100	0,27	13.240.100	99,44	99,44	1,52	1,07	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			78.025.600	1,60	74.150.800	95,03	66,70			
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			66.572.700	1,37	66.439.900	99,80	66,49	1,37	0,91	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permukiman	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permukiman Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	0	0	0	0	0	0	0	ANDI ASNAWI, S.Sos
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			0	0	0	0	0			
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	40.512.000	0,83	40.508.400	99,99	99,98	0,83	0,83	ANDI ASNAWI, S.Sos
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			40.512.000	0,83	40.508.400	99,99	99,98			
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	1025 Orang	26.060.700	0,54	25.931.500	99,5	99,5	0,53	0,53	ANDI ASNAWI, S.Sos
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			26.060.700	0,54	25.931.500	99,5	99,5			
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			11.452.900	0,24	7.710.900	67,33	67,33	0,16	0,16	

1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	11.452.900	0,24	7.710.900	67,33	67,33	0,16	0,16	ANDI ASNAWI, S.Sos
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			11.452.900	0,24	7.710.900	67,33	67,33			
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL										
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			617.574.090	12,70	610.321.420	98,83	98,14	12,55	12,46	
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	60000 Keluarga	617.574.090	12,70	610.321.420	98,83	98,14	12,55	12,46	IRWAN RIDWAN, ST
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			53.211.700	1,09	52.136.050	97,98	97,33	1,07	1,07	
				53.211.700	1,09	52.136.050	97,98	97,33			
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	60000 Keluarga	564.362.390	11,61	558.185.370	98,91	98,94	11,48	11,48	IRWAN RIDWAN, ST
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			168.862.390	3,47	168.685.370	99,9	98,92			
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi - Swakelola			395.500.000	8,13	389.500.000	98,48	98,96			
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA										
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			311.196.500	6,40	295.992.400	95,11	96,97	6,09	6,21	
				49.455.800	1,02	49.299.900	99,68	99,68	1,01	1,01	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pernakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang								
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan			49.455.800	1,02	49.299.900	99,68	99,68	1,01	1,01	SAIFUL, S.Sos

	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola		49.455.800	1,02	49.299.900	99,68	99,68			
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		261.740.700	5,38	246.692.500	94,25	94,25	5,07	5,07	
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	261.740.700	5,38	246.692.500	94,25	94,25	5,07	5,07	SAIFUL, S.Sos
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola		261.740.700	5,38	246.692.500	94,25	94,25			
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		21.095.000	0,43	21.036.200	99,72	99,72	0,43	0,43	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		21.095.000	0,43	21.036.200	99,72	99,72	0,43	0,43	
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	21.095.000	0,43	21.036.200	99,72	99,72	0,43	0,43	HELMI HALIM, SE
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola		21.095.000	0,43	21.036.200	99,72	99,72			
JUMLAH			4.862.495.295	100	4.781.858.884			98,34	98,34	

Belopa, 2025
KEPALA DINAS SOSIAL

HI. HASLIANA NURDIN, S.Pt., M.M.
Pkt. Pembina Utama Muda
NIP. 196905121995032004

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk miskin dan rentan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), pemerintah melalui Dinas Sosial telah melaksanakan berbagai upaya pemberian bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan serta rehabilitasi sosial.

Selain melakukan asistensi sosial melalui pemberian bantuan bagi KSM (Keluarga Sangat Miskin) penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Program Lanjut Usia terlantar (ASLUT), Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Program Perlindungan Sosial Anak (PPSA), juga diberikan pelayanan sosial melalui pemberdayaan dan pelayanan sosial luar panti yang berbasis keluarga dan masyarakat, serta penguatan sumber daya manusia dan lembaga kesejahteraan sosial. Penguatan sumber daya manusia serta lembaga kesejahteraan sosial merupakan dua strategi yang harus sejalan, jika asistensi sosial yang dominan maka kegiatan tersebut akan memberikan dampak yang kurang baik bagi kemandirian penduduk miskin dan rentan.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Dinas Sosial telah menyalurkan bantuan berupa Rehab Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 18 Unit, pemberian peralatan kebutuhan kepada anak panti di 2 LKSA, pendampingan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 21.808 KK, melakukan pendampingan kepada keluarga penerima Program Keluarga Harapan sebanyak 16,526 KPM, melakukan pelayanan sosial kepada korban bencana sebanyak 159 Jiwa, melakukan penanganan terhadap penyandang gangguan jiwa sebanyak 6 orang, serta melakukan pendampingan terhadap 150 orang penyandang disabilitas berat dan lansia. Sedangkan dalam upaya pemberdayaan PMKS Dinas Sosial telah menyalurkan bantuan sosial berupa bantuan modal usaha kepada Kelompok Usaha Bersama 30 Kelompok.

Tabel. 2.2

PENCAPAIAN KINERJA LAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN LUWU

No	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	14	15
1	Jumlah Sarana Sosial (Panti Asuhan, Panti Jompo, Panti Rehab) yang terbina			8	8	8	8	8	8	9	9	
2	Persentase Panti Sosial yang menerima program pemberdayaan sosial			100	100	100	100	-	75	100	100	
3	Jumlah kejadian bencana (kali)			35	35	168	159	22	24	159	159	
4	Persentase Kejadian Bencana yang tertangani			100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Jumlah Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat			30	40	39	45	29	29	45	45	
6	Jumlah PMKS yang tertangani			40.200	40.200	40.550	40.500	40.186	40.159	40.500	40.500	
7	Jumlah PMKS yang ada			50.431	51.484	50.484	78.172	51.484	51.484	78.792	78.792	
8	Persentase PMKS yang tertangani			79,71	78,08	80,32	51,81	78,06	78,00	51,40	51,40	
9	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun			40.000	45.000	47.000	50.000	40.529	41.830	62.000	65.000	
10	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya menerima bantuan sosial			50.431	51.484	50.484	78.172	51.484	51.484	78.792	78.792	

No	Indikator	SPM / standar	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
11	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	80	80	79,32	87,41	93,10	63,96	78,72	81,25	78,69	82,50			
12	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau Kelompok Sosial Ekonomi sejenis			500	500	459	459	300	357	200	200			
13	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau Kelompok Sosial Ekonomi sejenis			25.216	25.742	25.242	39.086	25.742	25.742	39.396	39.396			
15	Jumlah panti sosial dalam satu tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos			8	8	8	8	8	8	9	9			
16	Jumlah panti sosial dalam satu tahun yang seharusnya menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos			8	8	8	8	8	8	9	9			
17	Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	80	80	100	100	100	100	100	100	100	100			
18	Jumlah WKSBM yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial			-	-	120	220	0	0	220	220			
19	Jumlah WKSBM yang seharusnya menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial			-	-	120	220	0	0	220	220			
20	Persentase WKSBM menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	60	60	-	-	100	100	0	0	100	100			

No	Indikator	SPM / standar	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
21	Jumlah Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat			200	200	550	500	186	159	500	500	
22	Jumlah Korban Bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat			200	200	550	500	186	159	500	500	
23	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80	80	100	100	100	100	100	100	100	100	
24	Jumlah korban bencana dalam 1 tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat skala kabupaten			160	160	100	100	6	8	100	100	
25	Jumlah korban bencana dalam 1 tahun yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat skala kabupaten			200	200	200	200	186	40	200	200	
26	Persentase korban bencana dalam 1 tahun yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat skala kabupaten	80	80	80	80	50	50	3,23	20	50	50	
27	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun			150	2.483	2.879	3.141	150	2.483	3.141	3.141	
28	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 tahun			228	3.749	3.889	4.076	228	3.749	4.076	4.076	

No	Indikator	SPM / standar	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
29	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun	40	40	65,79	66,23	74,03	77,06	65,79	66,23	77,06	77,06	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Dalam kehidupan ekonomi, perbaikan kinerja birokrasi bisa memperbaiki iklim ekonomi kurang baiknya kinerja birokrasi menjadi salah satu faktor penting yang mendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Perbaikan kinerja pelayanan publik diharapkan mampu memperbaiki kembali citra pemerintah di mata masyarakat, karena dengan kualitas pelayanan yang membaik, kepuasan dan kepercayaan masyarakat bisa dibangun kembali sehingga pemerintah bisa meningkatkan legitimasi yang lebih kuat di mata publik.

Pelayanan yang dilakukan pemerintah dalam berbagai jenis pelayanan masih dianggap belum sesuai harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai pengaduan maupun keluhan, baik yang disampaikan secara langsung maupun lewat media cetak dan elektronik. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, upaya-upaya peningkatan pelayanan publik terus ditingkatkan melalui berbagai pembenahan yang menyeluruh baik aspek kelembagaan, kepegawaian, tatalaksana dan akuntabilitas. Acuan pelaksanaan pelayanan publik harus berlandaskan pada pelayanan prima dengan prinsip lebih baik (*better*), lebih cepat (*faster*), lebih murah (*cheaper*), lebih sederhana (*more simple*) dan actual (*newer*). Perlunya SPM dimaksudkan untuk:

1. Memberi pedoman kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan dasar khususnya di bidang sosial.
2. Menciptakan kesatuan langkah dalam menyelenggarakan pelayanan dasar bidang sosial sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah agar sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,
3. Memberikan perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum kepada masyarakat.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang/jasa kebutuhan dasar yang berhak diterima oleh setiap warga negara secara minimal sedangkan mutu pelayanan dasar

adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang/jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Propinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, ada 5 Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial;
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti sosial;
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti sosial;
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota.

Pada akhirnya, dengan adanya SPM bidang sosial dapat menjadi acuan untuk mengukur kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah. Artinya, SPM itu juga merupakan ukuran untuk melihat kinerja dinas.

Tingkat kinerja pelayanan Dinas Sosial sesuai dengan SPM sebagian besar sudah dilaksanakan, namun dari tahun 2011 urusan sosial mengenai penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat skala Kabupaten/Kota, yang meliputi bantuan sosial bagi korban bencana skala Kabupaten/Kota dan evakuasi korban bencana skala Kabupaten/Kota, pelayanan ini tidak sepenuhnya dilaksanakan di Dinas Sosial karena telah terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pada dasarnya Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial merupakan implementasi dari Tupoksi dan kewenangan yang ada dengan mensinergikan pada Kebijakan Pembangunan Kabupaten Luwu melalui capaian Visi dan Misi. Semua tujuan dan sasaran serta indikator Kinerja program dan kegiatan diarahkan untuk merealisasikan tujuan pembangunan masyarakat Kabupten Luwu secara keseluruhan. Dalam pelaksanaannya, tidak hanya dapat dilaksanakan oleh Dinas Sosial saja tetapi perlu dukungan instansi lain.

Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi terealisasinya tujuan dan sasaran kegiatan yang dilaksanakan. Dinamika masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan lingkungan kerja yang ada menuntut percepatan dalam

penyelesaian masalah yang cepat. Apabila faktor pengaruh dan permasalahan, baik internal maupun eksternal tidak teratasi akan mengganggu pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun faktor pengaruh sekaligus permasalahan tersebut, adalah:

1. Keterbatasan SDM

Kondisi ini terjadi disebabkan kurangnya SDM yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Luwu dan kurangnya perputaran pegawai yang seharusnya dapat menjadi penyegaran dan pengalaman. Secara kuantitas juga, masih kurang memadai sehingga percepatan penyelesaian pekerjaan tertunda dari target waktu sehingga pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan dapat terganggu.

2. Alokasi anggaran

Komposisi dan struktur anggaran yang diusulkan seringkali tidak dapat terealisasi seluruhnya. Hal ini membawa konsekuensi perlunya revisi terhadap program dan kegiatan yang sudah diusulkan. Optimalisasi menjadi berkurang, disebabkan alokasi anggaran yang terbatas. Akibatnya program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan alokasi anggaran yang ada menjadi kurang optimal dalam mencapai indikator kinerja yang diharapkan.

3. Sarana dan prasarana

Kenyamanan kerja dan peningkatan kinerja sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang ada. Hal ini memberikan kontribusi yang besar terhadap pelaksanaan dan kelancaran program/kegiatan. Kesuksesan pelaksanaan program dan kegiatan tergantung adanya kelengkapan sarana dan prasarana yang dapat menunjang secara langsung. Seringkali kendala dalam pelaksanaan kegiatan dapat terjadi karena dukungan sarana dan prasarana yang kurang memadai.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

TABEL. 2.3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

DINAS SOSIAL KAB. LUWU

No	Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	2			3	4	5	8	9
				DINAS SOSIAL				
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.091.033.097,00
1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				5.091.033.097,00
								5.091.033.097,00
1	1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN KETERSEDIAAN PENUNJANG PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100%	100 %	4.202.866.196,00
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu	100%	100 %	26.335.737,00
1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	13.955.292,00
1	06	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.327.160,00
1	06	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			

							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.327.160,00
1	06	01	2.01	0004			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.095.010,00
1	06	01	2.01	0005			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.077.155,00
1	06	01	2.01	0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	7.553.960,00
1	06	01	2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100 %	3.348.566.621,00
1	06	01	2.02	0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336 Orang/bulan	336 Orang/bulan	3.190.958.297,00
1	06	01	2.02	0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	153.960.000,00
1	06	01	2.02	0006			Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			

						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	3 Dokumen	1.067.494,00
1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan	2.580.830,00
1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah Pada SKPD	100%	100 %	9.610.060,00
1	06	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	9.610.060,00
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	0,00
1	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
						0		0 0	0,00
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100 %	250.348.105,00
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	1.256.084,00

1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	8 Paket	14.310.450,00
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	5.502.150,00
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	1.751.592,00
1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	14.400.000,00
1	06	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	22.980.721,00
1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	3 Laporan	3 Laporan	1.250.000,00
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	90 Laporan	188.897.108,00
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan Jasa	100%	100 %	256.435.261,00
1	06	01	2.08	0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		

									Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1600 Laporan	1500 Laporan	14.357.520,00
	1	06	01	2.08	0002				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
									Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	80.077.741,00
	1	06	01	2.08	0004				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
									Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	278 Laporan	372 Laporan	162.000.000,00
	1	06	01	2.09					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100 %	311.570.412,00
	1	06	01	2.09	0002				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
									Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	20 Unit	105.696.412,00
	1	06	01	2.09	0006				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
									Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	34 Unit	6.740.000,00
	1	06	01	2.09	0010				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
									Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	199.134.000,00
2	1	06	02						PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	100 %	100 %	18.187.632,00
									Persentase ketersediaan lembaga kesejahteraan sosial kabupaten			

	1	06	02	2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Cakupan KAT yang Diperoleh Pemberdayaan Sosial dalam Lingkup Kabupaten/Kota	1 Komunitas	1 Komunitas	1.045.526,00
	1	06	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT			
						Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Keluarga	1 Keluarga	1.045.526,00
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	2 PSKS	2 PSKS	17.142.106,00
	1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota			
						Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	22 Orang	22 Orang	6.150.166,00
	1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)			
						Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Sertifikat	20 Sertifikat	10.991.940,00
						Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	100 %	100 %	56.154.035,00
3	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			

1	06	04	2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	4 Layanan	4 Layanan	34.544.587,00
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	6.084.554,00
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	10 Orang	2.146.423,00
1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan			
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	25 Orang	26.313.610,00
1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan			
					Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	10 Orang	0,00
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) / Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	1 Layanan	21.609.448,00

5	1	06	06				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100 %	100 %	316.689.553,00
	1	06	06	2.01			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	15 Layanan	15 Layanan	44.394.073,00
	1	06	06	2.01	0001		Penyediaan Makanan				
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	2160 Orang	2160 Orang	44.394.073,00
	1	06	06	2.02			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1 Layanan	1 Layanan	272.295.480,00
	1	06	06	2.02	0002		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana				
								Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Orang	27 Orang	272.295.480,00
6	1	06	07				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan penyelenggaraan pengelolaan taman makam pahlawan nasional kabupaten	100 %	100 %	19.444.800,00
	1	06	07	2.01			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang Direhabilitasi dan Terpelihara	1 Unit	1 Unit	19.444.800,00

1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			
						Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	1 Makam
								19.444.800,00
							J U M L A H	5.091.033.097,00

2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses perencanaan tidak hanya dilakukan secara top down akan tetapi juga dilakukan secara bottom up artinya pihak pemerintah juga harus dapat mengakomodir usulan dari masyarakat terkait rencana pembangunan daerah melalui proses musrenbang. Sehingga dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kab. Luwu tentunya perlu mengakomodir berbagai usulan dari masyarakat selain program dan kegiatan yang telah di rumuskan oleh Dinas Sosial Kab. Luwu terkait rencana pencapaian target RPJMD Kab. Luwu dan Renstra Dinas Sosial Kab. Luwu tahun 2019-2024.

TABEL. 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN 2025
DINAS SOSIAL KABUPATEN LUWU

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase PMKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial		
	Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan penyelenggaraan pengelolaan data fakir miskin		
	Sub. Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Jumlah mahasiswa pra sejahtera yang mendapatkan bantuan penyelesaian study	60000 Keluarga	



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 sebagai berikut :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup;
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial sebagai berikut :

- a. Kemiskinan, yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.
- b. Ketelantaran, yaitu pengabaian/penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai sebab atau kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan fisik, psikis, dan sosial secara wajar yang disebabkan oleh ketidak mampuan sosial ekonomi, dan pengabdian terhadap tugas dan tanggungjawab;
- c. Kecacatan, yaitu hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi psikologi maupun fisiologis;
- d. Keterpencilan, yaitu isolasi alam yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami oleh komunitas adat terpencil atau kondisi kehidupan komunitas sosial budaya lokal yang tinggal pada lokasi yang terisolir secara geografis dan sukar terjangkau serta belum ada kontak (interaksi) dengan dunia luar;
- e. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, yaitu merupakan indikasi atas ketidak berhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religious, rekreasi dan pendidikan seseorang atau kondisi penyimpangan atau pelanggaran terhadap nilai dan norma sosial, moral, dan etika yang berlaku di masyarakat;
- f. Korban bencana, yaitu perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya; dan/atau
- g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, yaitu orang (baik individu, keluarga atau kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik dalam bentuk penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat meliputi :

- a. Rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- b. Jaminan Sosial, yaitu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- c. Pemberdayaan Sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga Negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- d. Perlindungan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Sosial tahun 2025 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Inovatif dan Responsif
2. Meningkatkan pemenuhan hak sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Korban Bencana Alam dan Sosial.

Sasaran yang ingin dicapai sesuai Renstra Dinas Sosial sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Pelayanan dan Pemberdayaan PMKS dan KAT
3. Meningkatkan Kapasitas Penanggulangan Bencana

Tabel. 3.1

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI : KABUPATEN LUWU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN MANDIRI DALAM NUANSA RELIGI			
Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan, dan Akuntabel			
Misi 9 : Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Untuk Mendorong Partispasi Publik;			
Misi 10 : Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Serta Penanggulangan Bencana			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Inovatif dan Responsif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Peningkatan kapasitas kelembagaan	Peningkatan dan pengembangan kapasitas dan kualitas SDM aparatur
			Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
Meningkatkan pemenuhan hak sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Korban Bencana Alam dan Sosial	Meningkatnya Pelayanan dan Pemberdayaan PMKS dan KAT	Memantapkan Kebutuhan kualitas hidup dan akses bagi PMKS terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan public, dan jaminan kesejahteraan social serta peningkatan pemberdayaan bagi PMKS dan KAT	Meningkatkan kualitas hidup bagi PMKS terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan public dan jaminan kesejahteraan sosial
			Peningkatan Pemberdayaan bagi PMKS dan KAT
	Memenuhi kebutuhan dasar korban bencana sosial	Memantapkan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas dan Kualitas SDM Tagana
			Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi korban bencana

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Unit Kerja Penanggung Jawab serta Lokasi

Renja Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Definisi Operational	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Inovatif dan Responsif	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	(jumlah unit kerja internal yang terlayani/total unit kerja) x 100	Sekretariat	Belopa
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evakuasi Kinerja		Sub. Program	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun			Belopa
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun			Belopa
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	-		Belopa
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	-		Belopa
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Belopa
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan		Sub. Keuangan	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN			Belopa
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen yang diverifikasi			Belopa
		Pengelolaan dan Penyajian Bahan	Bahan tanggapan pemeriksaan			Belopa

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Definisi Operasional	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
		Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD	yang dikelola dan disiapkan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun			
		Administrasi Barang Milik Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD		Sub. Kepegawaian	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah			Belopa
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian		Sub. Kepegawaian	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal			Belopa
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi perangkat umum perangkat daerah		Sub. Kepegawaian	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan			Belopa
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			Belopa
		Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan			Belopa
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan			Belopa
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah langganan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Belopa
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan material kebutuhan kantor yang disediakan			Belopa

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Definisi Operasional	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
Meningkatkan pemenuhan hak Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Korban Bencana Alam dan Sosial	Meningkatnya Pelayanan dan Pemberdayaan PMKS dan KAT	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jamuan makan dan minum yang disediakan			Belopa
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang disediakan jasa			Belopa
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik			Belopa
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor			Belopa
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara dan disediakan jasa pajak dan perizinannya			Belopa
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala			Belopa
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara			Belopa
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pemberdayaan			
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Definisi Operasional	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang menerima jasa			Kab. Luwu
		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan LK3			Kab. Luwu
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase warga migran korban tindak kekerasan yang telah tertangani			
		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debariasi Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal di Daerah Kabupaten dari Titik Debariasi			
		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debariasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk di Pulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi pemulangannya ke desa/kelurahan asal dari titik debariasi			Kab. Luwu
		Program Rehabilitasi Sosial	Presentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani			
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Lanjut Usia Telantar serta Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial	Jumlah Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial			
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Anak telantar, Disabilitas dan Lansia telantar luar panti yang menerima bantuan permakanan			Kab. Luwu

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Definisi Operasional	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang meneri Alat Bantu			Kab. Luwu
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia yang diReunifikasi dengan Keluarga			Kab. Luwu
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan spritual			Kab. Luwu
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah penyandang disabilitas lanjut usia telantar yang mendapatkan layanan data dan pengaduan			Kab. Luwu
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi			
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah sosialisasi NAPZA yang dilaksanakan			Kab. Luwu
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan pengelolaan data fakir miskin			
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kelurahan yang dilakukan pengelolaan data fakir miskinnya			Kab. Luwu
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah KPM yang mendapatkan fasilitasi bantuan PKH dan			Kab. Luwu

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Definisi Operasional	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
			Sembako Pangan			
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan penyelenggaraan pengelolaan taman makam pahlawan nasional kabupaten			
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten			
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Luas TMP yang dipelihara			Kab. Luwu
		Program Penanganan Bencana	Cakupan penyelenggaraan penanganan bencana lingkup kabupaten			Kab. Luwu
	Memenuhi kebutuhan dasar korban bencana sosial	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial			
		Penyediaan Makanan	Jumlah Korban Bencana yang disediakan kebutuhannya			Kab. Luwu
		Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kampung siaga bencana lingkup kabupaten			
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang aktif			Kab. Luwu

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Guna menunjang ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. Luwu Tahun 2025, maka disusun beberapa program dan kegiatan terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Luwu oleh Dinas Sosial Kabupaten Luwu. Adapun program dan kegiatan Dinas Sosial Kab. Luwu Tahun 2025 dibagi 2 (dua) yaitu Program dan Kegiatan Non-Urusan dan Urusan Wajib sebagai berikut :

A. Program dan Kegiatan Non-Urusan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - 6) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Dearah
 - 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 6) Penyediaan Bahan/Material
- 7) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program dan Kegiatan Urusan Wajib

1. Program Pemberdayaan Sosial
 - a. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2) Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
2. Program Penanganan Warga Negara Migran Tindak Kekerasan
 - a. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
 - 1) Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
3. Program Rehabilitasi Sosial
 - a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

- 1) Penyediaan Makanan
- 2) Penyediaan Alat Bantu
- 3) Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga
- 4) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
- 5) Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
- b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
 - 1) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
5. Program Penanganan Bencana
 - a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - 1) Penyediaan Makanan
 - b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - 1) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
6. Program Pengelolaann Taman Makam Pahlawan
 - a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - 1) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Luwu Selatan sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan Indikasi Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian 'bersifat indikatif' dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Luwu sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. Beberapa program dan kegiatan perubahan serta pendanaan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

**Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikator
Renja Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target 2025	Pagu Indikatorif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatorif (Rp)
1	2	3	4	8	9	11	12	13	15	16
		DINAS SOSIAL			5.091.033.097,00					5.135.600.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		5.091.033.097,00					5.135.600.000,00
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		5.091.033.097,00					5.135.600.000,00
1	06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	CAKUPAN KETERSEDIAAN PENUNJANG PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	4.202.866.196,00				100%	4.283.900.000,00
1	06 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu	100 %	26.335.737,00		Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	100%	34.300.000,00
1	06 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokum en	13.955.292,00	RETTRIBUSI DAERAH - LRA, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	3 Dokumen	20.000.000,00
1	06 01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokum en	1.327.160,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang	1 Dokumen	2.000.000,00

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
1	06	01	2.02	0003		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	153.960.000,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	4 Dokumen	154.000.000,00
1	06	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	1.067.494,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	3 Dokumen	1.200.000,00	
1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	14 Laporan	2.580.830,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	14 Laporan	2.700.000,00	
1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah Pada SKPD	100 %	9.610.060,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	100%	7.000.000,00
1	06	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	9.610.060,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	2 Laporan	7.000.000,00	
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	0,00		-	-	-	0,00	
1	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								

1	06	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	22.980.721,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	6 Paket	22.500.000,00
1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	1.250.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	3 Laporan	1.500.000,00
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	188.897.108,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	90 Laporan	160.000.000,00
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyelenggara Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan Jasa	100 %	256.435.261,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	100%	276.200.000,00
1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500 Laporan	14.357.520,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	1500 Laporan	14.500.000,00
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	80.077.741,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	12 Laporan	80.500.000,00
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							

					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	372 Laporan	162.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	278 Laporan	481.200.000,00
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	311.570.412,00	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	100%	320.000.000,00
1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
					Jumlah Kendaraan atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	105.696.412,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	20 Unit	113.000.000,00
1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	6.740.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	34 Unit	7.000.000,00
1	06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si	1 Unit	199.134.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	1 Unit	200.000.000,00
2	1	06	02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase ketersediaan lembaga kejahteraan sosial kabupaten	100 %	18.187.632,00			100 %	20.700.000,00
1	06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Cakupan KAT yang Memperoleh Pemberdayaan Sosial dalam Lingkup Kabupaten/Kota	1 Komuni tas	1.045.526,00	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	1Kor nuni s	1.200.000,00

Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT												
1	06	02	2.01	0001								
					Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Keluarga	1.045.526,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	1 Keluarga	1.200.000,00
	1	06	02	2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	2 PSKS	17.142.106,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	2PSKS	19.500.000,00
	1	06	02	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota							
					Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	22 Orang	6.150.166,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	22 Orang	7.000.000,00
	1	06	02	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)							
					Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Sertifika t	10.991.940,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	20 Sertifikat	12.500.000,00
					Persentase Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan	100 %	56.154.035,00				100 %	83.000.000,00
3	1	06	04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL							

1	06	04	2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	4 Layanan	34.544.587,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	4Layanan	42.000.000,00
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga						
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	6.084.554,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	10 Orang	10.500.000,00
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	2.146.423,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	50 Orang	15.500.000,00
1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan						
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	26.313.610,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	25 Orang	5.500.000,00
1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan						
					Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	0,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	25 Orang	10.500.000,00

1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PKKS) / Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	1 Layanan	21.609.448,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	1Layanan	41.000.000,00
1	06	04	2.02	0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA							
						Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	11.975.184,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	50 Orang	25.500.000,00
1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota							
4	1	06	05			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 Dokumen	9.634.264,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	2 Dokumen	15.500.000,00
					PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 %	477.690.881,00			100 %	484.000.000,00
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 %	477.690.881,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	100%	484.000.000,00
1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							

					Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Orang	272.295.480,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	05. Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	27 Orang	197.000.000,00
6	1	06	07		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	100 %	19.444.800,00				100 %	21.500.000,00
	1	06	07	2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Unit	19.444.800,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	1 Unit	21.500.000,00
	1	06	07	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota							
					Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	19.444.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	1 Makam	21.500.000,00
					J U M L A H		5.091.033.097,00					5.135.600.000,00



BAB V PENUTUP

Rencana kerja Dinas Sosial tahun 2025 adalah merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomi untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang yang tidak terlepas dari rencana strategi OPD tahun 2019 – 2024 dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) tingkat kecamatan, guna mendukung tercapainya target Pembangunan Daerah.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap stakeholders (Pihak yang terkait dan berkepentingan) di Dinas Sosial. Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kerja (Renja), maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini :

1. Mengkomunikasikan/sosialisasi rencana ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana yang telah dibuat.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholder yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan terkecuali jika ada kegiatan yang sifatnya mendesak dan sesuai kebutuhan untuk mencapai tujuan akhir organisasi.
3. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan direncana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang dibuat.
4. Pengevaluasi, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian kinerja seluruh aparat.

Semoga Renja Dinas Sosial Tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025, dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat ini dapat diwujudkan, untuk mencapai tujuan akhir bersama. Aamiin.

Belopa, 2025
KEPALA DINAS SOSIAL

HJ. HASLIANA NURDIN, S.Pt., M.M
Pkt. Pembina Utama Muda
NIP. 196905121995032004